

LAPORAN KINERJA T.A. 2019



INSPEKTORAT KOTA MEDAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Medan ini merupakan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja selama tahun 2019. Penyajian LKj menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

LKj Inspektorat Kota Medan tahun 2019 ini merupakan komitmen demi terwujudnya *good governance* di setiap jajaran Inspektorat Kota Medan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi aparatur pemerintah yang profesional serta memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Segala upaya yang akan dilakukan perlu mendapat dukungan dari berbagai komponen di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk bersinergi dalam mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi.

Demikian LKj Inspektorat Kota Medan tahun 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang relevan. Sekian dan Terima kasih.

Medan, *Februari* 2020

INSPEKTUR KOTA MEDAN,



IKHWAN HABIBI DAULAY, SH., M.H.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620107 198408 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini, bagi Inspektorat Kota Medan merupakan suatu media informasi pertanggungjawaban terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada Kepala Daerah. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Inspektorat Kota Medan melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Medan selama Tahun 2019 sebagai bahan penilaian dalam rangka peningkatan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MEDAN

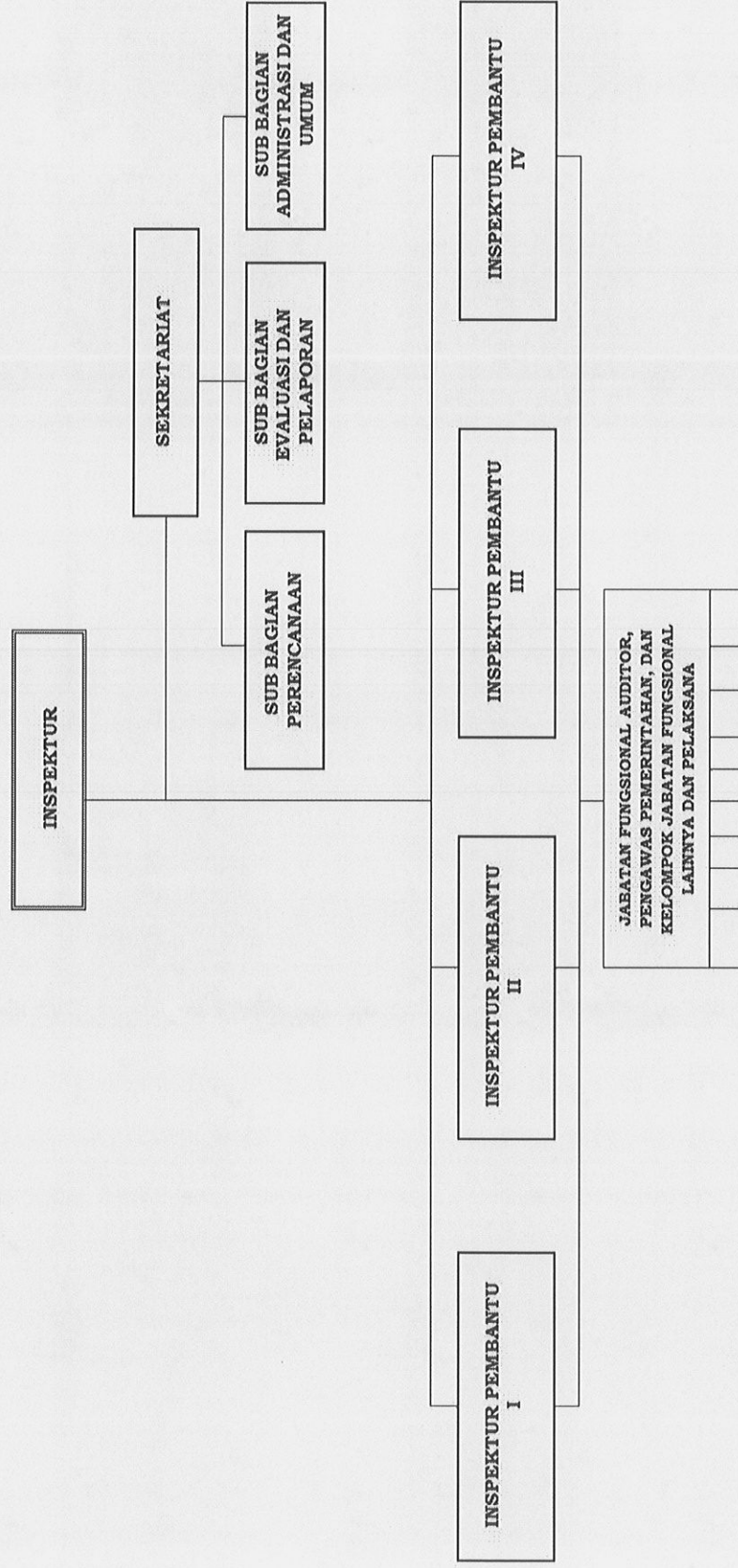
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang. Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu I;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan pelaksana.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);

- Perangkat Daerah kurang pro aktif terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh Perangkat Daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya *controllable* bagi inspektorat;
- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Peraturan Walikota yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

Isu Strategis dan Rumusan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2016-2021;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016-2021;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Medan merupakan keterpaduan (*intergrated*) antara keahlian sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya alam (*power resources*) agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, dan berfungsi sebagai penentu bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Medan sebagaimana dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Medan melalui pelaksanaan program-program bidang pengawasan yang di buat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Wali Kota Medan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Strategis 1: Menurunnya Perangkat Daerah yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi.

IKU : - Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material;
- Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM;
- Persentase PD yang telah melaksanakan SPIP dengan tingkat kematangan Berkembang (Level 2).

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

IKU : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti;

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

IKU : - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B;

- Persentase temuan yang berindikasi efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP.

Tujuan 2 :

Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapabilitas APIP.

IKU : Level Kapabilitas APIP.

2. Cara pencapaian tujuan dan sasaran

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan 2016-2021 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Tabel 4.2
Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

VISI Kepala Daerah	Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius		
MISI I Kepala Daerah	Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan.	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 4. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko
	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengawas lain dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemantauan; 2. Memutakhirkan penyelesaian tindak lanjut.

VISI Kepala Daerah	Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius		
MISI I Kepala Daerah	Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi Perencanaan, Pengorganisasian dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Menyusun pedoman evaluasi sakiip yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Memantau penyelesaian rencana aksi atas perbaikan SAKIP 4. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP; 5. Mengevaluasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebelum dilakukan konsolidasi.
Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan pemenuhan atas elemen kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat; 2. Mengaplikasikan sistem penghargaan dan hukuman;

VISI Kepala Daerah	Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius		
MISI I Kepala Daerah	Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			3. Mengaplikasikan hasil Diklat/Bimtek untuk peningkatan internal pengawas dan pelaksanaan pengawasan; 4. Menyusun laporan perencanaan yang mengimplementasikan Kinerja. 5. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi.

B. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Inspektorat Kota Medan adalah :

- a. memperhatikan kepentingan masing-masing Bidang dan Bagian;
- b. mempertimbangkan keadaan masa kini dan masa datang;
- c. memperhatikan Skala prioritas yang menjadi menunjang Visi dan Misi.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Medan

Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2019 sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas setelah P.APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan alat tulis kantor
- b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- d) Penyediaan makanan dan minuman;
- e) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- f) Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran;
- g) Penyediaan jasa komunikasi (jaringan internet).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
- c) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
- d) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
- e) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- b) Pengadaan pakaian olah raga.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

- a) Penyusunan Renja;
- b) Penyusunan LPPD dan LKPJ Inspektorat Kota Medan;
- c) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- d) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
- e) Penyusunan Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f) Penyusunan revisi Renstra Inspektorat.

5. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- a) Koordinasi Pengawasan APIP;
- b) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Medan;
- c) Tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Medan;
- d) Audit/Evaluasi/Pemantauan
- e) Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- f) Maturitas SPIP;
- g) Penilaian Zona Integritas;
- h) Pengawasan Terpadu;
- i) Penyelesaian Kerugian Daerah;
- j) Survei Penilaian Integritas;
- k) Pendampingan kegiatan pemeriksaan eksternal;
- l) Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- m) Unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- n) Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- o) Reviu RKA RAPBD dan PAPBD;
- p) Penyelenggaraan tutup buku akhir tahun;

6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan

- a) Pengiriman tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan mengikuti Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan;
- b) Pelatihan Kantor Sendiri;
- c) Gelar Pengawasan Daerah;
- d) Peningkatan level kapabilitas APIP;
- e) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Petunjuk Bidang Pengawasan.
- f) Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Pemeriksa Internal dan Eksternal.

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010, Inspektorat Kota Medan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2019 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama tahun 2019. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparaturng; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat Kota Medan telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Medan TA. 2019 (*terlampir*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan kinerja Inspektorat Kota Medan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Medan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2019. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja dilingkungan Inspektorat Kota Medan.

2. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Medan tahun 2019 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja tahun 2019.

Sedangkan dalam menghitung persentase (%) capaian kinerja Tahun 201X yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} \text{ Tahun } 201X = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pada pengukuran kinerja akan ditampilkan nilai dari pencapaian masing-masing indikator yang disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- ≥ 85 = Sangat Berhasil

- 70 s.d. <85 = Berhasil
- 55 s.d. <70 = Cukup Berhasil
- < 55 = Kurang Berhasil

Capaian kinerja Inspektorat Kota Medan sesuai dengan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2019	Capaian	Persentase
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	25%	30.36%	82.35%
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	15%	6%	39%
	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	2	2.8	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP b. Eksternal	50%	0%	0%
		50%	77,52%	155,04%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	60%	14,29%	23.81%
	Persentase temuan yang berindikasi efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	65%		
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2	67%

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	2017	2018	2019
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	-	-	45%	30%
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	-	-	0%	6%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	2017	2018	2019
	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	-	-	3	2.8
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP	-	-	0%	0%
	b. Eksternal	90,60%	96,99%	76,86%	77.52%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	-	-	62,50%	14.29%
	Persentase temuan yang berindikasi efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	-	-	50%	
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	-	-	100%	100%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2

d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2019	2019	Capaian
Menurunnya PD yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	25%	30,36%	136,36%
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	15%	6%	39%
	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan	2	2	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP	50%	0%	0,00%
	b. Eksternal	50%	77,52%	155,04%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	60%	14,29%	23,81%
	Persentase temuan yang berindikasi efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	65%	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2019	2019	Capaian
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	100%	100%	100,00%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2	67%

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat di lihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

Demi mewujudkan *good government* (pemerintahan yang baik), *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan *clean*

Governance (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Kinerja tata kelola keuangan daerah tercermin dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Internal dan eksternal.

Dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut khususnya BPK RI melahirkan temuan-temuan yang terdiri dari temuan yang bersifat administrasi dan berupa kerugian negara/daerah.

Berdasarkan dari matriks tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa pada tahun 2019 dari 56 SKPD terdapat 33 SKPD yang memiliki temuan yang bersifat kerugian negara/daerah, dan untuk tahun 2019 terdapat tambahan SKPD yang mendapat temuan terkait kerugian daerah yaitu Balitbang, DP2K, Satpol PP dan DPKPPR Kota Medan sehingga capaian SKPD yang mendapat temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi adalah sebanyak 17 SKPD dengan persentase 30,36%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 25% sehingga capaian dari target adalah sebesar 82,35%.

Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI, Inspektorat akan meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada SKPD yang menjadi objek pemeriksaan serta terus melakukan pemantauan/monitoring atas temuan-temuan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

2. Indikator kinerja 2

Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM

Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan

dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB.

Capaian Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM tahun 2019 masih 6% dari target 15%.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 pada Pemerintah Kota Medan telah ditunjuk 3 OPD wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.

3. Indikator Kinerja 3

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola

dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.

Capaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkatan Berkembang / Level 2 dengan skor 2.800.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdapat pada unsur Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan pengendalian.

4. Indikator Kinerja 4

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan APIP dan Eksternal

Capaian temuan APIP dan Eksternal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Temuan	Target 2019	Capaian	Persentase
APIP	50%	0%	0%
Eksternal	50%	77,52%	155,04%

Berdasarkan tabel diatas, capaian tindak lanjut temuan APIP masih 0%, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Inspektorat Kota Medan fokus melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan BPK RI. Dan Capaian temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019 adalah 155,04% dari target 50%.

Untuk mendapatkan target capaian temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, laporan hasil pemeriksaan/pengawasan perlu dikelola dengan baik dan dibuat kegiatan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Medan. Pemantauan tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan

temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terdapat tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu tindak lanjut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid.

5. Indikator Kinerja 5

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B

Capaian persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B pada tahun 2019 adalah 14,29% dari total 56 perangkat daerah yang dievaluasi.

Target perangkat yang mencapai minimal nilai B tahun 2019 adalah 60% dari total perangkat daerah yang dievaluasi atau 23,81% dari target.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat diketahui terdapat 8 perangkat daerah mendapat nilai B yaitu Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Medan Labuhan dan Dinas Perdagangan Kota Medan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagian besar perangkat daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Indikator Kinerja 6

Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP.

Capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah 100%.

Hal ini dicapai melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan yang pelaksanaannya paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

7. Indikator Kinerja 7

Peningkatan Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Area Proses Kunci/Key Process Area (KPA) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 2 Plus Inspektorat Kota Medan dari 6 (enam) elemen 4 (elemen) telah memenuhi Level 3 dan terdapat 2 elemen yang masih berada di Level 2, sesuai dengan tabel berikut:

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Pada tahun berjalan Inspektorat Kota Medan sedang mengupayakan untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan

dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 111 (seratus Sebelas) orang yang terdiri atas:

- Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	KOMPOSISI (orang)	TERISI (orang)	TIDAK TERISI (orang)	JENIS KELAMIN	
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Inspektur	1	1	-	1	-
2	Sekretaris	1	1	-	1	-
3	Irbn	4	4	-	4	-
4	Kepala Sub.Bagian	3	3	-	3	-
Total		9	9	-	9	-

Komposisi jabatan struktural telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Komposisi Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional per 31 Desember 2017

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Struktural	9	9	-
2	Fungsional Auditor	34	18	16

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
3	Fungsional P2UPD	30	23	7
4	Tenaga Administrasi	29	17	12
Total		103	68	35

Komposisi jabatan struktural dan Fungsional sudah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pemantauan atas tindak lanjut LHP pemeriksa internal dan eksternal yang didalamnya terdapat aktifitas berupa pemantauan tindak lanjut LHP, sedangkan kegiatan lain yang mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang didalamnya terdapat aktivitas inventarisasi temuan pengawasan, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dan realisasinya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

APBD Inspektorat Kota Medan Tahun 2019

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Belanja		36.478.024.000	22.598.460.687	61,95%
	Belanja Tidak Langsung	17.978.024.000	15.110.936.222	84,05%
	Belanja Pegawai	17.978.024.000	15.110.936.222	84,05%
Belanja Langsung		18.500.000.000	7.487.524.465	40,47%
	Belanja Pegawai	3.691.600.000	1.360.344.052	36,85%
	Belanja Barang dan Jasa	14.473.858.538	5.904.614.813	40,80%
	Belanja Modal	334.541.462	222.565.600	66,53%

Anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.36.478.024.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp17.978.024.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp18.500.000.000,00.

Realisasi anggaran menunjukkan angka yang rendah disebabkan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan pengiriman Bimtek/Diklat bagi pegawai Inspektorat serta keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan yang menyebabkan beberapa kegiatan pemeriksaan tidak terlaksana.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Medan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Medan Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kinerja yang dilaporkan dalam LKj Tahun 2019 ini merupakan kinerja yang berfokus kepada hasil (*outcome*). Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2019 akan menjadi umpan balik untuk manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2016-2021, Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2019.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan diikuti dengan perbaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Inspektorat Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan.